

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini negara Indonesia akan terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Punarbhawa dan Aryani, 2013). Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa pajak sangat tidak mungkin negara ini dapat melakukan pembangunan. Menurut Widodo dan Djefris (2008:5), hasil pembayaran pajak unit individual dan korporasi diterima pemerintah sebagai penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai ketersediaan barang dan jasa publik (*public goods and public service*) yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat secara terpisah (*private goods*).

Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun persentase. Dalam APBNP 2014 kontribusi pajak sebesar Rp1.232 trilliun dari pendapatan negara Rp1.598 trilliun atau sebesar 77 % dari pendapatan negara. Oleh karena itu, peran pajak dalam pembangunan nasional sangat penting. Dari

presentase kontribusi tersebut, penerimaan pajak yang dicerminkan oleh kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2013 hanya mencapai *tax ratio* sebesar 13,5%. Sedangkan pada tahun 2014 *tax ratio* diprediksi mencapai 14,0-14,50% (matapajak.com). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sangat rendah.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak masih minim. Menurut Rahmany (2011) dalam Kuraesin (2009), pengetahuan masyarakat soal pajak masih minim, hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak orang yang belum tahu, seolah-olah bayar pajak harus di kantor pajak, padahal kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak. Persepsi itu menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak, ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang.

Menurut Gardina dan Haryanto (2006) dalam Mulya (2012) yang dikutip oleh Nisa dan Aji (2014) salah satu penyebab berpengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada jajaran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang telah menempuh jurusan perpajakan.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* menuntut adanya peranan aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Punarbhawa dan Aryani, 2013). Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang

mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara (Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Langkah konkrit yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak tahun 2014 dengan melakukan upaya-upaya strategis secara lebih fokus, sinergis, dan terkoordinasi. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian SPT PPh melalui *e-filing* untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan semakin meningkat. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, karena program reformasi administrasi perpajakan ini mempunyai tujuan tercapainya : (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem

administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*. Dengan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan modernisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Fasmi dan Misra (2013) konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Modernisasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemerintah berupaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan menetapkan adanya sistem administrasi perpajakan modern agar pemungutan pajak lebih sempurna. Dengan diterapkannya sistem administrasi modern dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat

kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan APBN guna membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga untuk penelitian kali ini peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Pati)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Punarbhawa dan Aryani (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Punarbhawa dan Aryani (2013) yaitu susunan dari variabel independennya dan subjek penelitian. Pada penelitian Punarbhawa dan Aryani (2013) subjek penelitiannya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Denpasar Barat, sedangkan subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pati baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Pati ?

2. Bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Pati.
2. Untuk mencari bukti empiris pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pati.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi tentang pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pati.

4. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian dibidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas rumusan masalah penelitian, *review* penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.